
**REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Oleh
Rita Dwi Putri
Jurusan Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Email: ritadwiputri02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh reviu laporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal terhadap kualitas laporan keuangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deksriptif asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah Kepala OPD, Kasubag Keuangan dan Bendahara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Solok. Kuesioner disebar ke 26 OPD yang ada di Kabupaten Solok.

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima bahwa reviu laporan keuangan (X1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2,213 lebih besar dari ttabel pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,996, maka $2,213 > 1,996$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,00 < 0,05)$. Hipotesis kedua (H2) diterima bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruwal (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 3,727 lebih besar dari ttabel pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,996, maka $3,727 > 1,996$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,00 > 0,05)$. Hasil uji F diperoleh nilai F hitung $40,583 > 2,213$, atau nilai signifikan $0,00 < 0,05$, sehingga Hipotesis ketiga (H3) diterima bahwa Reviu Laporan Keuangan (X1) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal (X2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Kata Kunci: Reviu, SAP Berbasis Akruwal, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan diatur dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD. Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya

mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas pada pemerintah daerah perlu adanya reviu laporan keuangan oleh pihak terkait yaitu Inspektorat. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk

dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Salah satu kegiatan pengawasan internal yaitu melalui kegiatan reviu atas LKPD. Pada penelitian (Kalumata, 2017) pada kabupaten kota di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa reviu laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh proses reviu LKPD oleh Inspektorat.

Selain Reviu laporan keuangan dalam mewujudkan laporan keuangan berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sehingga, tinggi-rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Kaertika & Safitri, 2017).

Pada penelitian (Kiranayanti & Erawati, 2016) mengemukakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hasil penelitian ini

menunjukkan semakin tinggi penerapan Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah Reviu laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 3) Apakah Reviu laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengaruh reviu laporan keuangan terhadap kualitas laporan, pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan dan Untuk mengetahui pengaruh reviu laporan keuangan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan.

LANDASAN TEORI

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan". Laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota merupakan laporan keuangan yang disusun dengan dasar laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan keuangan OPD merupakan hasil pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-

pihak yang berkepentingan (Erlina dkk, 2015: 19).

2. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Menurut (Maulana, 2017) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Sedangkan menurut (Kaertika & Safitri, 2017) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.

3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

reviu laporan keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. (Agus Prasetyo, Sifrid S Pangemanan, 2011)

Terdapat beberapa pengertian reviu yaitu berdasarkan:

a. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP): reviu adalah pelaksanaan prosedur

permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER44/PB/2006 reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 membagi proses reviu dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan reviu. Perencanaan reviu memiliki indikator pemahaman entitas, penilaian SPI dan penyusunan program kerja. Pelaksanaan reviu memiliki indikator persiapan, permintaan keterangan dan prosedur analisis. Sementara pelaporan reviu memiliki indikator penyusunan laporan reviu dan penyampaian laporan reviu.

4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah adalah regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah

dengan harapan akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*). Dalam PP No. 71 tahun 2010 pasal 1ayat (3) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP Berbasis Akruial, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruial, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akruial untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010).

SAP berbasis akruial di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deksriptif asosiatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang berisikan daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori. Sedangkan analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik yang relevan untuk menguji hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kasubag Keuangan dan Bendahara di masing-masing OPD di

Kabupaten Solok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen (bebas) menurut Sugiyono (2013:39) adalah merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat). Dalam penelitian ini Reviu laporan keuangan (X1) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruial (X2) menjadi variabel independen. Variabel Dependen (variabel terikat) adalah kualitas laporan keuangan (Y).

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan alat bantu pengolahan SPSS

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Koefisien konstanta

b₁,b₂ = Koefisien Regresi

X₁ = Reviu laporan keuangan

X₂ = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruial

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner disebar ke 26 OPD yang ada di Kabupaten Solok yaitu terdiri dari Kepala OPD, Kasubag Keuangan dan Bendahara. Sebanyak 78 kuesioner yang telah dibagikan, dan 70 kuesioner yang kembali dan 8 kuesioner yang tidak kembali. Kuesionoer yang tidak kembali diakibatkan karena responden yang sedang tidak berada di tempat dan factor lain. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian diuji, diantaranya adalah uji instrumen (Uji

Validitas dan Uji Reliabilitas) dimana hasilnya dinyatakan reabel dan valid. Sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu uji asumsi klasik.

1. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian Uji Asumsi Klasik menggunakan 3 uji yaitu 1) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam kajian penelitian ini menggunakan *P-P Plot*. Dengan grafik diperoleh dari output titik-titiknya mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. 2) Uji multikolinearitas, uji multikolinearitas didapatkan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel $> 0,1$ dan nilai VIF untuk masing-masing variable < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Sehingga penelitian ini dapat untuk diteliti lebih lanjut. 3) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan model regresi berganda dikarenakan lebih dari satu variabel bebas. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y), Reviu Laporan Keuangan (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X2).

Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	9,309	5,300	
Reviu Laporan Keuangan	0,119	0,054	0,248
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	0,351	0,094	0,418

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS versi 25.0

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,309 + 0,119X_1 + 0,351X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 9,309 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Reviu Laporan Keuangan (X1 dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X2) bernilai nol maka tingkat Kualitas Laporan Keuangan bernilai positif sebesar 9, 309 satuan.
2. Koefisien Reviu Laporan Keuangan (X1) sebesar 0,119 bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Reviu Laporan Keuangan (X1) 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,119 satuan, dengan asumsi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X2) adalah bernilai tetap.
3. Koefisien Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X2) sebesar 0,351 bernilai positif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (X2) 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,351 satuan, dengan asumsi Reviu Laporan Keuangan (X1) adalah bernilai tetap.

3. Pengujian Hipotesis
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.309	5.300		1,756	0,084
Reviu Laporan Keuangan	0.119	0.054	0,248	2,213	0,000
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	0,351	0,094	0,418	3,727	0,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	151,091	2	75,545	16,565	0,000 ^b
	Residual	305,552	67	4,560		
	Total	456,643	69			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
 b. Predictors: (Constant), Reviu Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,575 ^a	0,331	0,311	2,136

a. Predictors: (Constant), Pengaruh Reviu Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
 b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Pengolahan Data Statistik SPSS versi 25.0 (2021)

1. Pengaruh Reviu Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,213 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,996, maka $2,213 > 1,996$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,00 < 0,05)$. Hal ini membuktikan hipotesis pertama dapat diterima bahwa reviu laporan keuangan (X1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Reviu terhadap laporan keuangan pada OPD sangat diperlukan dalam meningkatkan

kualitas laporan keuangan, Reviu atas LKPD dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan ruang lingkup meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan kata lain Reviu LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Hal ini sejalan pada penelitian (Maulana, 2017), bahwa proses reviu berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu yang berkualitas, yang sesuai dengan Standar Reviu, akan menghasilkan rekomendasi yang tepat sehingga dapat membantu dalam penyusunan LKPD yang berkualitas, dan penelitian (Kalumata et al., 2016) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa reviu laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh proses reviu LKPD oleh Inspektorat.

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Diani, 2014) yang menyatakan bahwa mekanisme Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun anggaran 2015 dan 2016 belum sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Reviu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LKPD. Hal ini disebabkan belum adanya perencanaan reviu yang memadai yang terdapat pada penilaian SPI, dan pelaksanaan reviu yang tidak sesuai dengan jadwal serta pelaksanaan pada prosedur analitis yang masih terdapat beberapa masalah pada Pelaporan Keuangan

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,727 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,996, maka $3,727 > 1,996$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,00 > 0,05)$. Hal ini membuktikan hipotesis kedua diterima bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Penting bagi penyelenggara laporan keuangan pemerintah dalam menggunakan basis akuntansi yang tepat untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini karena merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan tepat mengenai basis akuntansi yang digunakan. Penegasan tentang hal ini telah diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Keuangan Akuntansi Pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Wulandari et al., 2018) bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, berkaitan dengan hal tersebut pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mempunyai pilihan dua basis, yaitu SAP berbasis akruaI dan SAP berbasis kas menuju akruaI. Penerapan SAP berbasis akruaI dalam

lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya SAP berbasis akruaI ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

3. Pengaruh Reviu Laporan Keuangan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil uji F diperoleh nilai F hitung $40,583 > 2,213$, atau nilai signifikan $0,00 < 0,05$, sehingga variabel Reviu Laporan Keuangan (X1) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (X2), secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian dan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Reviu Laporan Keuangan (X1) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (X2), secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Reviu laporan keuangan dan Penerapan Standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI harus dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Sebaliknya, apabila reviu laporan keuangan daerah rendah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI yang belum efektif, dan dapat menimbulkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Pujanira & Taman, 2017) Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual. Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berbasis akrual membutuhkan sistem akuntansi. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mampu memberikan output data berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Reviu laporan keuangan berpengaruh signifikan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi reviu laporan keuangan maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Dengan rutusnya dilakukan reviu oleh Inspektorat maka tingkat ketelitian dan kehati-hatian OPD dalam penyusunan laporan keuangan semakin meningkat sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya basis akrual terhadap penyusunan laporan keuangan maka terciptalah laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
3. Reviu laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan agar memberikan pelatihan terhadap Bendahara dan Kasubag Keuangan pada tiap-tiap OPD supaya tercipta laporan keuangan yang berkualitas.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar bisa memperluas ruang lingkup penelitian dan

penambahan responden yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dikarenakan masih terdapat faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait reviu laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- [2] Agus prasetyo, sifrid pangemanan. 2011. Analisis Dampak reviu Inspektorat terhadap kualitas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kab.minahasa tenggara TA.2010 dan 2011. Jurnal accountability
- [3] Baridwan, Zaki. 2015. Intermediate Accounting. Edisi Kedelapan. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- [4] Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [5] Kuntadi, C. 2012. Auditor dan Pengamat Kebijakan Publik. Tangerang: Seminar dan Diskusi Panel Reviu Laporan Pemerintah Pusat / Daerah.
- [6] Mardiasmo. (2011). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- [7] Notoatmodjo, S. 2014. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- [8] Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

- Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1, No.1. Hal: 2337-3806..
- [9] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- [10] Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*. Semarang
- [11] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [12] Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [13] Wilkinson, W.J., Cerullo, M.J., Raval, V. dan Wong-On-Wing, B. (2015). *Accounting information systems: essential concepts and applications*. Fourth Edition. John Wiley Sons. Inc.
- [14] Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. (2010). Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variable intervening pengendalian intern akuntansi (Studi empiris di Pemda Subosukawonosraten Kota Semarang. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- [15] Diani, d. I. (2014). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal ekonomi universitas negeri padang*, 1–25.
- [16] Hadi, & darwanis. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan, 10(2), 81–94.
- [17] Kalumata, m. C. ., ilat, v., & warongan, j. D. . (2016). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, reviu laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah provinsi sulawesi utara. 17, 2015.
- [18] Kiranayanti, i. Ayu enny, & erawati, n. Made adi. (2016). Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *E-jurnal akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- [19] Maulana, m. S. R. (2017). Analisis atas reviu laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten minahasa. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- [20] Pujanira, p., & taman, a. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal, barometer riset akuntansi dan manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- [21] Permendagri no 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah
- [22] Pp 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah
- [23] Rofika, r., kamaliah, k., & rahmadani, s. (2015). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten pasaman bara. *Jurnal online mahasiswa fakultas ekonomi universitas riau*, 2(2), 34108.

-
- [24] Studi, p. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan, 10(2), 81–94.
- [25] Sundari, h., & rahayu, s. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kota bandung tahun 2018). *Jurnal e-proceeding of management*, 6(1), 660–667.
- [26] Wulandari, t., hidayati, n., & mawardi, m. Choli. (2018). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan sap berbasis akrual di opd kabupaten malang. *E-jra*, 07(10), 119–131.